

Indonesia Urutan 63 Negara Gagal
Erabaru.net
June 21, 2012
By Era Baru News

Lembaga riset pendidikan dan penelitian yang berpusat di Washington, Amerika Serikat, The Fund for Peace (FFP) menyebutkan urutan Indonesia menempati pada peringkat ke 63 dalam daftar Negara Gagal.

Sekitar 178 negara yang dirilis, Indonesia berada dalam daftar ke-63 negara gagal. Indeks Negara Gagal ini adalah edisi delapan tahunan yang lebih menyoroti tekanan politik, ekonomi dan sosial global yang dialami negara.

Melansir dari situs resmi FFP *fundforpeace.org*, penyebutan negara gagal berdasarkan dari indikator isu sosial, ekonomi, dan politik, dan lebih dari 100 sub-indikator. Termasuk isu-isu seperti pembangunan tidak merata, protes massa, legitimasi Negara, dan HAM.

Tahun 2012 FSI peringkat Somalia sebagai nomor satu selama lima tahun berturut-turut, dengan alasan terjadinya pelanggaran hukum yang meluas, pemerintah tidak efektif, terorisme, pemberontakan, kejahatan, dan serangan bajak laut.

Sementara Finlandia tetap dalam posisi terbaik, dengan Skandinavia tetangganya Swedia dan Denmark pada peringkat ketiga. Catatan indikator sosial dan ekonomi, menempatkan negara-negara tersebut memiliki peringkat yang baik dan dipasangkan dengan kebijakan yang sangat baik dari pelayanan publik serta menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Perubahan penting lainnya tahun ini termasuk negara yang terkena dampak *Arab Spring* seperti Bahrain, Mesir, Libya, Suriah dan Tunisia semua peringkat secara signifikan lebih buruk dari pada tahun sebelumnya.

Penurunan Libya adalah yang paling luar biasa, dengan negara masuk dalam daftar yang terburuk dari tahun ke tahun semakin memburuk dalam sejarah FSI sebagai akibat dari perang saudara, kampanye NATO dari serangan udara dan jatuhnya rezim Qaddhafi. Demikian juga, Suriah termasuk dalam daftar keempat terbesar tahun ke tahun semakin memburuk dalam sejarah FSI sebagai kampanye kekerasan oleh pemerintah Assad.

Peringkat Yunani terus menurun karena krisis ekonomi melanda negara tersebut. Hilangnya kepercayaan di negara tersebut, bertepatan dengan ketidakmampuan negara untuk memberikan pelayanan publik yang kemudian menyebabkan berkembangnya tekanan sosial.

"Kami menilai 178 negara memiliki tekanan atas negara yang mereka dikelola. Perbedaan antara mata pencaharian dalam negara sebagian besar merupakan produk dari kapasitas negara dan masyarakat," ujar Direktur Eksekutif FFP, Krista Hendry.

"Tahun ini kami akan mengembangkan indeks kapasitas untuk menguji asumsi kami bahwa bagaimana negara-negara itu mengelola tekanan yang lebih baik ketika mereka memiliki masyarakat terbuka berdasarkan supremasi hukum dan demokrasi," jelasnya.
(mas)

